



## **KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA**

### **(Studi Perbandingan Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru pada Pelaksanaan Program 1 Milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu)**

**Cici Asmawatiy**

STIA Bina Banua Banjarmasin

cici.asmawatiy@stiabinabanuabjm.ac.id

**Abstract:** *The results showed that the performance of the Village Government in the implementation of the 1 Billion 1 Village program in Mattone Kampung Baru Village and Pasar Baru Village, in terms of the Village Government's responsiveness in accommodating and realizing community aspirations, was considered good. Productivity of development implementation, especially infrastructure development in Pasar Baru Village is achieved more maximally and of good quality, while for New Mattone Kampung Village the achievement of infrastructure development productivity is in accordance with the standards. The responsibility of the Village Government in monitoring infrastructure development in Mattone Kampung Baru and Pasar Baru Villages, the Village Government divided the work according to the duties and functions of each business. Village Government Accountability in the form of Village Government Accountability Reports (LPJ) to the community in Pasar Baru Village was delivered in writing through the information media available at the Pasar Baru Village Office to the community through the BPD and verbally through village meetings, and for a period of 5 (five ) This year no village government LPJ that was rejected by the village community showed good accountability by the Pasar Baru Village Government. While in Mattone Kampung Baru village, it was only carried out verbally to the community members through village meetings and meetings.*

**Keywords:** *Performance, Village Government, 1 M 1 Village Program*

**Abstrak:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program 1 Milyar 1 Desa di Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru, dalam hal Responsivitas Pemerintah Desa dalam menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, dalam menjangkau dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dinilai sudah baik. Produktivitas pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur pada Desa Pasar Baru tercapai secara lebih maksimal dan berkualitas baik, sementara untuk Desa Mattone Kampung Baru pencapaian produktivitas pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan standar. Responsibilitas Pemerintah Desa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru, Pemerintah Desa melakukan pembagian pekerjaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing urusan. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ) kepada masyarakat di Desa Pasar Baru disampaikan secara tulisan melalui media-media informasi yang ada di Kantor Desa Pasar Baru kepada masyarakat melalui BPD dan lisan melalui pertemuan di desa, dan selama waktu 5 (lima) tahun ini tidak ada LPJ pemerintah desa yang ditolak oleh masyarakat Desa ini menunjukkan akuntabilitas

yang baik oleh Pemerintah Desa Pasar Baru. Sementara pada desa Mattone Kampung Baru hanya dilakukan secara lisan kepada warga masyarakat melalui pertemuan dan rapat desa.

**Kata Kunci:** Kinerja, Pemerintah Desa, Program 1 M 1 Desa

Negara merupakan suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaanya, baik politik, militer, ekonomi, sosial, maupun budaya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut menurut Sufianto Dadang (56: 2015). Negara Indonesia merupakan Negara Republik yang di pimpin oleh Presiden. Negara Indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Asia setelah Tiongkok. Pada awal pemerintahan Indonesia sebagai sebuah Negara hanya berpusat di pulau Jawa dengan Jakarta sebagai ibukota negara yang dalam perkembangannya menimbulkan banyak ketimpangan sosial di berbagai pelosok tanah air, untuk mengatasi hal tersebut pada tahun 2007 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 mengenai otonomi daerah yang salah satu bunyinya: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara itu menurut pendapatnya Dadang (152: 2015) bahwa pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan daerah otonom oleh pihak pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD dengan berdasarkan asas desentralisasi. Dengan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas bagi pemerintah daerah secara nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dalam rangka mengatur, mengurus dan mengelola kepentingan masyarakat di daerah. Adapun yang dijadikan dasar atau landasan pelaksanaan otonomi daerah ini adalah Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Ketetapan MPR ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur melalui Undang-Undang yang terbaru yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Melalui penguatan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat mengharapkan adanya kinerja yang lebih baik lagi pemerintahan daerah baik tingkat kabupaten/kota, kecamatan, ataupun kelurahan. Terkait hal tersebut Prawirosentiono (1999) mengartikan kinerja sebagai sebuah hasil kerja yang harus dicapai dan dipenuhi oleh seseorang baik secara individu atau sekelompok orang dalam sebuah organisasi, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing sehingga mampu mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan terutama secara legal, dengan tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Sedangkan Benardin dan Russel (1998) secara sederhana mengemukakan bahwa kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil pada aktivitas organisasi atau fungsi kerja khusus selama kurun waktu tertentu.

Termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai wilayah kesatuan masyarakat yang memiliki otonomi asli, memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus dan mengelola urusan rumah tangga di desa dan masyarakat desa. Sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan pada wilayah pedesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan maupun meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada masyarakat pedesaan.

Maschab Mashuri (1: 2013) mengemukakan bahwa desa merupakan suatu masyarakat yang hidup sederhana, dan sebagian besar hidupnya bergantung dari sektor pertanian. Memiliki sebuah ikatan sosial yang kuat serta memegang adat dan tradisi yang kental, memiliki sifat jujur dan bersahaja, pendidikannya sebagian masih rendah dan lain-lain. Terkait dengan itu semua bahwa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berdasarkan hal di atas pada tahun 2015 pemerintah kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan sebuah Program 1 milyar 1 desa dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kabupaten untuk melakukan percepatan pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu Pada tanggal 8 April 2003 Tanah Bumbu resmi berdiri setelah memekarkan diri dari kabupaten Kota Baru. Program 1 milyar 1 desa ditujukan kepada seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuan program tersebut tidak lain untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang berada di desa, dimana dana satu milyar tersebut akan di pergunakan oleh pemerintahan desa.

Desa Mattone Kampung Baru merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kusan Hilir dengan jumlah penduduk sekitar 2.195 jiwa dengan kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai nelayan. Desa Mattone Kampung Baru di kenal juga dengan desa wisata karena memiliki banyak objek wisata salah satunya Benteng makam pahlawan, kuburan raja-raja bugis dan pantainya. .

Kondisi yang berbeda antar desa dalam pelaksanaan program kegiatan 1 milyar 1 desa di Kabupaten Tanah Bumbu ini mengisyaratkan bahwa masih belum optimalnya pelaksanaan dari program tersebut. Yang kemudian juga menggambarkan bahwa masih rendahnya kinerja pemerintah desa.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti Kinerja Pemerintahan Desa Mattone Kampung Baru Dalam Rangka Pelaksanaan Program 1 milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu.

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru dalam pelaksanaan Program 1 milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kinerja pemerintahan Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru dalam pelaksanaan Program 1 milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian studi perbandingan dengan membuat perbandingan gambaran dan deskripsi yang sistematis, sesuai fakta dan

akurat mengenai fakta-fakta mengenai kinerja Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru Kabupaten Tanah Bumbu dalam pelaksanaan program 1 milyar 1 desa.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian kualitatif lebih mengutamakan pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah, dengan sumber data primer (utama). Sehingga proses dan teknik pengumpulan data lebih mengacu dan mengutamakan pada kegiatan observasi partisipan dan wawancara secara mendalam (dalam Sugiono,2008:309). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Selain itu dalam proses pengumpulan data menggunakan beberapa alat Bantu yaitu Pedoman Wawancara, Panduan Observasi dan Alat Dokumentasi

### **Analisis Data**

Dalam penelitian ini digunakan Analisis data kualitatif secara induktif. Teknik analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah analisis dari Miles dan Huberman (1984). Teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman ada dua yaitu model interaktif dan model analisis alur. Dalam kegiatan penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis model alur. yaitu: tahapan reduksi data, tahapan penyajian data, dan tahapan penarikan kesimpulan/verifikasi simpulan.

Reduksi data pada penelitian ini merupakan proses pemilihan data dari hasil wawancara dan observasi maupun dokumentasi, selanjutnya melakukan pemusatan perhatian pada penyederhanaan transformasi data awal yang diperoleh dari catatan di lapangan.

Setelah melakukan kegiatan reduksi data, maka langkah selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Langkah terakhir dalam analisis data penelitian kualitatif ini adalah penarikan simpulan penelitian. Simpulan pada penelitian kualitatif ditujukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Kinerja Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru dalam rangka pelaksanaan Program 1 milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu**

gambaran mengenai kinerja Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program 1 milyar 1 Desa pada Desa Mattone Kampung Baru adalah sebagai berikut:

#### **1). Responsivitas (kemampuan Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru untuk menerima dan merealisasikan berbagai aspirasi masyarakat desa)**

Responsivitas Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa Mattone Kampung Baru untuk menyerap aspirasi masyarakat Mattone Kampung Baru, khususnya dalam kegiatan menyusun berbagai kegiatan dan prioritas pembangunan dan pelayanan dan menerima aspirasi dalam program pelayanan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru selanjutnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat ini dalam bentuk program pembangunan desa yang dituangkan dalam RPJMDes Mattone Kampung Baru. Kegiatan menerima dan menyerap aspirasi masyarakat pada Desa Mattone Kampung Baru ini melewati proses penjangkaran aspirasi masyarakat.

Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru senantiasa cepat tanggap, demikian yang dilakukan Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru. Selain menerima aspirasi masyarakat, pemerintah Desa Mattone Kampung Baru

memberdayakan perangkat desa dan mengerahkan para ketua Rukun Tetangga untuk menggali dan mengenali berbagai aspirasi masyarakat di RT nya masing-masing terutama kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan fisik.

Di Desa Mattone Kampung Baru dan dalam penggunaan alokasi dana 1 milyar 1 desa melalui beberapa tahapan salah satunya rapat bersama warga yang disebut Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Untuk *resvonsives* indikator yang digambarkan lebih kepada kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat penerima layanan dan penyediaan sarana untuk menyalurkan aspirasi atau saran dan harapan dari masyarakat.

Daya tanggap pemerintah desa Mattone terhadap kebutuhan masyarakat sudah cukup baik, karena mengutamakan fasilitas umum dalam pembangunan desa berupa pengerasan jalan bagi masyarakat di pinggiran desa, meskipun ada sebagian kecil masyarakat yang kurang setuju.

Teknis penyampaian aspirasi masyarakat dengan mengadakan MUSRENBANG (musyawarah rencana pembangunan) sebagai tahap awal arah pembangunan, yang di ikuti tokoh-tokoh masyarakat, aparatur desa, perwakilan pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat.

Unsur masyarakat yang terlibat dalam penjaringan aspirasi untuk perencanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa di Desa Mattone Kampung Baru, diantaranya Tokoh masyarakat, Aparatur Desa (Ketua RT, BPD, KAUR, SEKDES, KADES), LPM, Mantan Kepala Desa, PKK, Karang Taruna, dan Perwakilan Masyarakat di setiap RT. Dalam kegiatan penjaringan aspirasi ini

Tidak ada yang mendominasi, semua yang hadir di dalam musyawarah memberikan pendapat sesuai kebutuhan di lingkungannya masing-masing.

Pemerintah Desa Pasar Baru dalam menyerap dan merealisasi berbagai aspirasi masyarakat desa yaitu disamping dengan memberdayakan perangkat desa dan mengerahkan para ketua Rukun Tetangga untuk menggali dan mengenali berbagai aspirasi masyarakat di RT nya masing-masing terutama kebutuhan masyarakat dalam bidang pembangunan fisik. Pemerintah Desa Pasar Baru juga mengadakan pertemuan dengan masyarakat desa pada Kantor Desa Pasar Baru. Pertemuan desa yang diadakan oleh Pemerintah Desa Pasar Baru dengan mengundang seluruh bagian dari masyarakat yang berkaitan dengan Pembangunan Di Desa Pasar Baru. Yaitu untuk membahas secara bersama-sama berbagai permasalahan yang ada di desa Pasar Baru. Serta menggali aspirasi atau kebutuhan yang di inginkan oleh masyarakat di Desa Pasar Baru yang kemudian akan diusulkan dalam berbagai program kegiatan pembangunan desa.

Di Desa Pasar Baru dalam penggunaan alokasi dana 1 milyar 1 desa melalui beberapa tahapan salah satunya rapat bersama warga yang disebut Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Untuk *resvonsives* indikator yang digambarkan lebih kepada kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat penerima layanan dan penyediaan sarana untuk menyalurkan aspirasi atau saran dan harapan dari masyarakat.

Teknis penyampaian aspirasi masyarakat dalam perencanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa di Desa Pasar Baru: pertama tama dilakukan musrembangdes maka pemerintah desa memanggil masyraakat yg meliputi. RT,

RW, dan masyarakat umum, juga BPD. Untuk mengetahui keinginan masyarakat setelah sudah tau berbagai macam aspirasi masyarakat maka dirembukkan lagi dengan aparat desa disini kepla desa yang memastikan kelapangan baahwa emang yg dipilih adalaah keinginan masyarakat yaang paling mendesak dan sangat diprioritaskan.

Baik di Desa Mattone Kampung Baru maupun di Desa Pasar Baru mempunyai prosedur dan aturan masing-masing dalam rangka menyerap, menggali, serta merealisasi aspirasi masyarakat desa. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah desa telah menyadari bahwa kegiatan pembangunan infrastruktur pada desa masing-masing tidak akan bisa terwujud secara maksimal tanpa kebersamaan antara masyarakat desa dan pemerintah desa. Prosedur yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru dan Pemerintah Desa Pasar Baru ini bisa menjadi model bagi desa yang masih belum melibatkan aspirasi dari masyarakat desa terutama dalam kegiatan pembangunan desa. Karena disadari bahwa keperluan dan kekurangan yang ada di desa masyarakat yang paling mengetahui dan merasakan, sehingga tanpa saran dan masukan dari masyarakat desa maka pemerintah desa akan lebih maksimal dalam melakukan pembangunan desa sehingga dengan demikian masyarakat desa menganggap kinerja pemerintah desa sudah bagus dan memuaskan masyarakat.

### **Produktivitas (Kualitas dan Kuantitas Pembangunan infrastruktur Desa)**

Penilaian produktivitas dalam kineja pemerintah desa dalam pelaksanaan program dana desa 1 milyar 1 desa melihat kepada efisiensi dan kualitas hasil pekerjaan infrastruktur dalam pembangunan di desa. Dalam penyelesaian kegiatan

pembangunan di Desa Mattone Kampung Baru, Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru dan masyarakatnya menyatakan bahwa dalam menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru berusaha dengan mengoptimalkan setiap waktu yang tersedia dalam bekerja oleh pekerja di lapangan yang sesuai dengan waktu dalam kontrak kerja. Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru senantiasa menggajak masyarakat desa untuk bekerja sama secara swadaya menyelesaikan suatu pekerjaan dan kegiatan pembangunan desa yang bisa dikerjakan dengan swadaya masyarakat sehingga pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu. Karena dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan infrastruktur ini Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru juga memiliki kewajiban untuk menyelesaikan administrasi kegiatan berupa laporan pertanggungjawaban pemerintah desa.

Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru mengerjakan administrasi kegiatan pembangunan infrastruktur yang sudah terlaksana. Sehingga pelaporan kegiatan lainnya tidak terbengkalai oleh pemerintah desa. Dengan kegiatan pembangunan infrastruktur fisik yang sudah ada, masyarakat Desa Mattone Kampung Baru menyatakan bahwa manfaat yang dirasakan dengan adanya pembangunan di desa yaitu sangat membantu untuk jalannya berbagai aktivitas masyarakat di Desa Mattone Kampung Baru.

Program kegiatan untuk pembangunan desa di Desa Mattone Kampung Baru diajukan dalam Rancangan Peraturan Desa mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), hal ini sesuai dengan ketentuan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuannya adalah

kelancaran kegiatan dan roda pemerintahan desa serta kegiatan pembangunan desa. RPJMDes ini sebagai pedoman dalam pemasukan dan pengeluaran keuangan desa Mattone Kampung Baru. Ini menunjukkan produktivitas yang baik dimiliki Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru, dalam menyelesaikan pembangunan fisik di Desa Mattone Kampung Baru.

Produktivitas Pemerintah Desa Pasar Baru dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pasar Baru menurut Kepala Desa dan aparat desa maupun masyarakat Desa Pasar Baru yaitu dengan merencanakan pembangunan dengan standar dan kualitas yang tinggi. Program pembangunan yang menghasilkan kualitas dan standar yang tinggi akan sangat didukung oleh ketersediaan material yang juga berkualitas. Sehingga dalam kegiatan pembangunan, Pemerintah Desa Pasar Baru senantiasa memulai pembangunan infrastruktur adalah dengan menyediakan bahan bangunan atau material yang berkualitas yang akan digunakan oleh para pekerja lapangan.

ketika bahan material pembangunan sudah terkumpul dengan lengkap maka diharapkan pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik dan lancar. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa Pasar Baru ini bertujuan supaya kegiatan pembangunan tidak meleset dari waktu yang ditentukan. Pemerintah Desa Pasar Baru juga selalu berusaha mendukung semua kegiatan pembangunan agar berjalan dengan baik dan lancar.

Perencanaan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Desa Pasar Baru lebih mengutamakan kualitas mutu pembangunan. Hal ini karena pemerintah desa menyadari bahwa dengan peningkatan kualitas pembangunan, maka yang akan

menikmati hasil pembangunan adalah juga seluruh warga masyarakat di Desa Pasar Baru. Pembangunan di Desa Pasar Baru kualitas hasil dari kegiatan program 1 Milyar 1 Desa sudah sangat baik.

### **Kualitas Layanan**

Penilaian terhadap kualitas layanan terlihat dari hasil dalam menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur. Kualitas layanan Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru merupakan hasil kerja yang dalam program pembangunan infrastuktur yang sudah terlaksana dan dapat diwujudkan di Desa Mattone Kampung Baru. Terkait dengan kebutuhan dari masyarakat maka pembangunan infrastruktur yang sudah dihasilkan di Desa Mattone Kampung Baru adalah sebagai kebutuhan yang berasal dari aspirasi masyarakat dan yang menjadi prioritas kegiatan bagi masyarakat Desa Mattone Kampung Baru.

Kualitas layanan Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru dan masyarakatnya menyatakan bahwa dalam menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru berusaha dengan mengoptimalkan setiap waktu yang tersedia dalam bekerja oleh pekerja di lapangan yang sesuai dengan waktu dalam kontrak kerja. Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru senantiasa menggajak masyarakat desa untuk bekerja sama secara swadaya menyelesaikan suatu pekerjaan dan kegiatan pembangunan desa yang bisa dikerjakan dengan swadaya masyarakat sehingga pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu. Karena dalam pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan infrastruktur ini Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru juga memiliki

kewajiban untuk menyelesaikan administrasi kegiatan berupa laporan pertanggungjawaban pemerintah desa.

Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru mengerjakan administrasi kegiatan pembangunan infrastruktur yang sudah terlaksana. Sehingga pelaporan kegiatan lainnya tidak terbengkalai oleh pemerintah desa. Kualitas layanan Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru sudah dicapai dengan baik oleh Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru, dalam menyelesaikan pembangunan fisik di Desa Mattone Kampung Baru.

Kualitas layanan Pemerintah Desa Pasar Baru dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pasar Baru menurut Kepala Desa dan aparat desa maupun masyarakat Desa Pasar Baru yaitu dengan merencanakan pembangunan dengan standar dan kualitas yang tinggi. Program pembangunan yang menghasilkan kualitas dan standar yang tinggi akan sangat didukung oleh ketersediaan material yang juga berkualitas. Sehingga dalam kegiatan pembangunan, Pemerintah Desa Pasar Baru senantiasa memulai pembangunan infrastruktur adalah dengan menyediakan bahan bangunan atau material yang berkualitas yang akan digunakan oleh para pekerja lapangan.

Bahan material pembangunan diharapkan pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik dan lancar. Langkah yang diambil oleh Pemerintah Desa Pasar Baru ini bertujuan supaya kegiatan pembangunan tidak meleset dari waktu yang ditentukan. Pemerintah Desa Pasar Baru juga selalu berusaha mendukung semua kegiatan pembangunan agar berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Desa Pasar Baru lebih mengutamakan kualitas mutu pembangunan. Hal ini karena pemerintah desa menyadari bahwa dengan peningkatan kualitas pembangunan, maka yang akan menikmati hasil pembangunan adalah juga seluruh warga masyarakat di Desa Pasar Baru.

### **Responsibilitas (Tanggungjawab Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan)**

Responsibilitas Pemerintah Desa dalam hal ini adalah dimana dalam menjalankan pemerintahan desa setiap urusan telah dibebankan tugas masing-masing dimana untuk menghasilkan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan maka ini merupakan wujud tanggungjawab atas kewajibannya dalam suatu tugas, fungsi dan wewenang di dalam pembangunan infrastruktur. Tugas dan fungsi pemerintah desa di dalam menjalankan tugasnya dibidang pembangunan infrastruktur dengan tata cara atau mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pemerintah desa maka harus adanya mekanisme yang dipakai dan menjadi acuan di dalam berjalannya suatu kegiatan pembangunan di Desa sehingga Pemerintah Desa bisa dikatakan bertanggungjawab terhadap tugas, fungsinya di dalam Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru memiliki beberapa urusan yang terkait dengan tugas dan fungsi dalam Pembangunan Desa. Beberapa urusan Pembangunan dari Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru antara lain: memberdayakan masyarakat desa, membangun partisipasi masyarakat desa, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersamaan dalam

kegiatan pembanguna desa, bersama-sama memelihara sarana dan prasarana fisik di desa, sampai dengan menyusun laporan di bidang pembangunan desa.

Responsibiliti atau biasa disebut dengan tanggung jawab yaitu bagaimana cara suatu organisasi memberikan tanggung jawab atau menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan yang implisit dan eksplisit. Responsibility indikator yang digambarkan lebih mengarah kepada pertanggung jawaban aparat terhadap pelaksanaan tugas yang sudah dilaksanakan kepada atasan.

Teknis pertanggung jawaban program kegiatan 1 Milyar 1 Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Mattone Kampung Baru Berupa LPJ yaitu Laporan Pertanggung Jawaban dan mengadakan Rapat pertanggung Jawaban. Kepala Desa secara tidak langsung mempertanggung jawabkan pelaksanaan 1 milyar 1 desa dengan terlibat langsung mengesahkan LPJ, dimana tahapan LPJ pertama di serahkan ke pemerintahan kecamatan untuk di periksa kemudian dikoreksi sebelum di serahkan ke pemerintahan kabupaten.

Pada Pemerintah Desa Pasar Baru dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pembangunan desa, bahwa setiap unsur pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa dibantu oleh Ketua RW dan Ketua RT berusaha melakukan pekerjaan sesuai dengan beban pekerjaan yang sudah diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada saat diminta tanggungjawab atas kepercayaan yang diberi khususnya dalam pembangunan fisik dan infrastruktur desa maka setiap unsur pemerintahan desa akan senantiasa mampu untuk

menunjukkan bagian yang dikerjakannya masing-masing. Hal ini merupakan wujud tanggungjawab yang telah dibebankan kepada setiap aparat Pemerintah Desa Pasar Baru.

Responsibiliti atau biasa disebut dengan tanggung jawab yaitu bagaimana cara suatu organisasi memberikan tanggung jawab atau menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang benar dan sesuai dengan kebijakan yang implisit dan eksplisit. Responsibility indikator yang digambarkan lebih mengarah kepada pertanggung jawaban aparat terhadap pelaksanaan tugas yang sudah dilaksanakan kepada atasan.

Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru Dan Pemerintah Desa Pasar Baru sudah melakukan kegiatan pengawasan terhadap berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Mattone Kampung Baru maupun Desa Pasar Baru. Berdasarkan tugas masing-masing urusan memiliki kewajiban bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang ada di desa. Dalam pengawasan sendiri kegiatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja akan di beri teguran dan harus memperbaiki hasil kerjanya sesuai dengan yang ada dalam kontrak kerja.

#### **Akuntabilitas (Dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kepada Masyarakat)**

Akuntabilitas Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru dalam hal ini merupakan kegiatan untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap tahun anggaran kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru selama ini sudah cukup bagus dalam

memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat Desa Mattone Kampung Baru yang melalui Badan Permusyawaratan Desa. Setelah laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan tembusan kepada Bupati melalui Camat.

Disamping penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru juga menginformasikan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Mattone Kampung Baru kepada masyarakat secara langsung. Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru menempelkan selebaran yang berisi kegiatan yang berlangsung di desa.

Akuntabiliti atau pertanggung jawaban yakni bagaimana suatu organisasi publik memeberikan suatu pertanggung jawaban kepada masyarakat. Dan akuntabilitas juga berfungsi sebagai penggerak jalannya suatu kegiatan organisasi publik. Sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban individu-individu atatu yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung jawabannya.

Di Desa Mattone Kampung Baru dan pertanggung jawab seperti ini dalam hal program 1 milyar 1 desa biasa dilakukan musyawarah hasil kegiatan penggunaan dana dan dibukukan dalam bentuk LPJ. Dikarenakan Badan masyarakat seperti LPM, PKK, Karang Taruna dan lain-lain di libatkan dalam

MUSRENBANG maka dalam rapat pertanggung jawaban semua badan desa di undang untuk terlibat.

Terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah desa di Desa Mattone Kampung Baru atau melakukan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa kepada seluruh masyarakat, Tidak secara langsung karena dalam rapat pertanggung jawabana hanya perwakilan masyarakat yang di undang dan dilibatkan, namun setiap perwakilan diwajibkan menyebar luaskan informasi mengenai laporan pertanggung jawaban kepada seluruh masyarakat. Yaitu dalam bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desadi Desa Mattone Kampung Baru berupa LPJ dan Rapat pertanggung jawaban. Sementara terkait pertanggung jawaban ini tidak pernah ada penolakan dari badan permusyawaratan desa maupun dari masyarakat terhadap pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa di Desa Mattone Kampung Baru.

Akuntabilitas Pemerintah Desa Pasar Baru adalah dalam memberikan LPJ kepada BPD. LPJ pada tahun anggaran 2010-2011 diterima oleh BPD Desa Pasar Baru akuntabilitas Pemerintah Desa Pasar Baru selama ini sudah cukup bagus dalam hal memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui BPD secara lisan namun dalam bentuk tulisan dalam menginformasikan kegiatan apa saja yang berlangsung di Desa Pasar Baru belum berjalan hingga saat ini dengan alasan tidak ada masyarakat yang memperhatikan bila menempelkan informasi kegiatan jika dibuat.

Pemerintah desa pasar baru melakukan pertanggung jawaban terhadap masyarakat melalui laporan rincian pendapatan dana dan pengeluaran dana, serta sisa kas yang ada sebelumnya melalui media proyektor yang dibuka di forum padasat musrembang des yng membahas pertanggung jawaban, dan juga pada dinding dikantor desa yang di tempel, namun kendalanya pada tahun 2015 itu masih menggunakan kertas sehingga pemberitahuan tidak bertahan lama, dan untuk proyektor hanya ditampilkan pada masyarakat yang ikut musyawarah saja.

Bentuk pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 D pada Desa Pasar Baru berupa LPJ. Untuk Desa Pasar baru tidak ada penolakan terhadap pertanggung jawaban pemerintah desa, karna BPD sendiri mengawasi perkembangan dari setiap kegiatan yang diolah, dan apabila terjadi kesalahan atau kualitas dari jalan atau bahan bangunan yang diolah (jika infrastruktur) mereka dan masyarakat sekitar yg melihat dan mengerti proes terebut sudah langsung memprotes sehingga desa mendapat kritik langsung, maka desa langsung memperbaiki sehingga tidak menunggu bangunan selesai baaru di kritisi, mengingat dessa pasar baaru memiliki tingkat SDM yang bagus sehingga kesalahan sedikit dapat terbaaca oleh masyarat didesa tersebut. Sehingga dalam pelaporan ertanggung jaawaban tidak ada permasalahan. Dan dari masyarakat pun tidak pernah ada penolakan dari masyarakat desa terhadap pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa di Desa Pasar Baru, karena masyarakat sendiri ikut mengamati dan memantau perkembangan jalannya dana 1 m tersebut. Sehingga jika terdapat perbedaan/kesalahan yang tidak sesuai

dengan yang dimusyawarahkan maka masyarakat langsung mengkritisi dan desa langsung memperbaiki.

## **Faktor-faktor yang menghambat kinerja pemerintahan Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru dalam rangka pelaksanaan Program 1 milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu**

### ***1. Penataan Organisasi***

Penataan organisasi adalah tentang bagaimana suatu organisasi di atur tentang bagaimana cara suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu penataan organisasi di anggap berhasil apabila tujuan organisasi tersebut berhasil dan sukses dilaksanakan. Selain itu penataan organisasi meliputi : kewenangan dan struktur organisasi kerja.

#### **a. Kewenangan**

Terkait kewenangan ini Kepala Desa di tempatkan sebagai Pengawas Kegiatan dan bagian dari pemberi pengesahan dalam penggunaan dana untuk di serahkan kepada TPK. Sementara keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mattone Kampung Baru atau dalam upaya pengelolaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa Hanya bertindak sebagai pengawas kegiatan

Teknis pertanggung jawaban dari pemerintah desa di Desa Mattone Kampung Baru atau dalam pengelolaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa berupa LPJ yaitu Laporan Pertanggung Jawaban dan mengadakan Rapat pertanggung Jawaban.

Sementara itu pada Desa Pasar Baru kewenangan sepenuhnya ada ditangan kepala desa pasar baru, tetapi keputusan yang diambil tidak lepas dari arahan masyarakat karena masyarakat lah yang paling mengetahui atas apa yang mereka inginkan, namun kepala desa yang memilah dan memilih bagian mana yang

memang benar benar perlu dan sangat mendesak. Di desa pasar baru BPD tidak ikut serta dalam pengelola dana namun hanya mengawasi konerja dan dana yang dipergunakan oleh desa

#### **b. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah suatu susunan yang dibentuk oleh organisasi tersebut agar dapat menyusun dan menentukan strategi sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pembentukan pemerintahan desa dimulai dengan pemilihan kepala desa kemudian kepala desa yang memilih jajaran struktur organisasi pemerintahan desa. Selama ini tidak ada kendala dari struktur organisasi yang dijalankan pada pemerintah desa di Desa Mattone Kampung Baru atau dalam pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa.

Begitu juga dengan Desa Pasar Baru bahwa tidak ada kendala dari struktur organisasi yang dijalankan pada pemerintah desa di Desa Mattone Kampung Baru atau dalam pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa.

### ***2. Sumber Daya Organisasi***

Sumber daya organisasi yaitu menyangkut tentang apa saja yang diperlukan oleh suatu organisasi secara menyeluruh. Sumber daya organisasi meliputi :

#### **a. Pegawai**

Di Desa Mattone Kampung Baru dan perangkat desa terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SD sampai dengan S1. jumlah aparatur desa yang ada di Desa Mattone Kampung Baru dari Kepala Desa sampai dengan Ketua RW dan Ketua RT adalah sebanyak 17 orang.

Kalau dilihat dari tingkat pendidikan masing-masing aparatur desa yang ada di Desa Mattone Kampung Baru tergolong rendah karena kebanyakan tidak sampai lulus SMA. Kondisi tingkat pendidikan yang ada sekarang cukup menghambat pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa di Desa Mattone Kampung Baru, dikarenakan informasi yang di berikan terkadang lambat dalam menjalankannya.

Kegiatan pelatihan bagi aparatur desa di Desa Mattone Kampung Baru atau dalam upaya mendukung pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa. Berupa pelatihan pelaporan bagi sekdes dan bendahara, dan pelatihan penyusunan rab dan penggunaan dana bagi fasilitator desa. kegiatan pelatihan memberikan manfaat bagi kelancaran pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa, namun dirasa masih kurang signifikan.

Sementara untuk Desa Pasar Baru terkait dengan sumber daya manusia ini perangkat desa terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SD sampai dengan S1. Namun demikian kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan program 1 Milyar 1 Desa sudah cukup baik. Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggung jawaban sudah terlaksana dengan baik.

#### b. Pembiayaan

Pembiayaan adalah besaran dana yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan segala sesuatu dalam suatu organisasi publik, dengan pembiayaan yang mendukung suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar. Suatu organisasi akan lebih maju apabila ditunjang pembiayaan yang memadai. Untuk pembiayaan

telah tersedia pembiayaan di Desa Mattone Kampung Baru dan yang diberikan anggaran oleh pemerintah daerah untuk menjalankan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa. Dan pembiayaan yang diberikan sudah mencukupi untuk pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa, karena sebelum dana diturunkan pemerintah desa wajib menyerahkan RAB pembangunan secara rinci, jadi dana yang turun pasti mencukupi.

Sementara itu untuk Desa Pasar Baru bahwa alokasi dana desa nya dari retribusi pasar. Desa pasar baru sebenarnya masih kurang karena banyak sekali yang ingin diperbaiki, misalnya meningkatkan UKM agar pendapatan asli desa meningkat bukan hanya dari retribusi pasar. Ini menggambarkan bahwa keinginan dari pemerintah desa untuk memajukan pembagunan desa adalah cukup baik. Karena adanya kemampuan dari perangkat desa untuk senantiasa meningkatkan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik pada Desa Pasar Baru. Sehingga dana yang tersedia dirasa selalu masih kurang mencukupi.

Teknis pengelolaan keuangan (pencairan, penyimpanan, penggunaan dan pertanggung jawaban) dalam pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa, yaitu:

- Tahapan awal Pemerintahan desa menyerahkan Rencana anggaran belanja desa yang di buat oleh Fasilitator desa kemudian di serahkan kepada pemerintahan kecamatan untuk dikoreksi bentuk RAB harus sangat rinci,
- Tahap kedua RAB yang sudah dikoreksi dan di perbaiki di sahkan oleh Kecamatan dan di serahkan kepada pemerintahan Kabuten unutup pencairan dana

- Tahap ketiga setelah dana cair dan masuk ke rekening desa, kemudian bendahara desa membuat berkas penyerahan dana kepada TPK ( tim pelaksana kegiatan) sebagai pengesahan.
- Tahap keempat dana yang ada di TPK di pergunakan sesuai isi dalam RAB setelah itu TPK membuat Laporan penggunaan dana
- Tahap Kelima TPK melaporkan kepada Kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa mengenai penggunaan dana berupa LPD
- Tahap Ke enam LPD yang sudah di sah kan kemudian di buat LPJ oleh Sekdes, bendahara dan di bantu fasilitator desa.
- Tahap ke Tujuh setelah LPJ selesai di sah kan kembali dalam rapat pertanggung jawaban.
- Tahap kedelapan LPJ diserahkan kepada kecamatan untuk dikoreksi
- Tahap Kesembilan Lpj di perbaiki oleh pemerintah desa kemudian di sahkan oleh pemerintahan kecamatan
- Tahap kesepuluh LPJ diserahkan kepada pemerintahan Kabupaten untuk pencairan tahap berikutnya.

### c. Peralatan

Suatu organisasi publik apabila peralatan belum menunjang yang ada di tempat bekerja maka, hal tersebut menjadi salah satu faktor penghamabat dalam menjalankan fungsi dan tugas dari organisasi publik tersebut. Terkait dengan peralatan ini di Desa Mattone Kampung Baru atau peralatan yang disediakan lengkap dan memadai, meskipun ada beberapa peralatan seperti computer dalam keadaan rusak dan usang.

Terkait dengan peralatan dalam melaksanakan program 1 Milyar 1 Desa ini pada Desa Pasar Baru lebih lengkap dari pada mattone. Desa Pasar Baru peralatan yang tersedia sudah mendukung terhadap pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa. Peralatan yang tersedia masih dalam kondisi baik.

### **3. Budaya Organisasi Pemerintah Desa**

Desa Mattone Kampung Baru merupakan desa yang masuk dalam wilayah Kecamatan Kusan Hilir. Desa yang sebagian besar kontur tanahnya adalah datar. Perkebunan kelapa membentang dari arah Timur ke Barat dengan luas kurang lebih 70% dari seluruh luas desa yang mencapai 286 hektar. Tidak banyak sumber daya alam yang potensial.

Secara administratif Desa Mattone Kampung Baru berbatasan dengan beberapa wilayah antara lain: sebelah Utara dengan Desa Penyolongan, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanete dan Desa Muara Pagatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Pagatan dan Desa Pulau Satu. Berdasarkan data diketahui bahwa pendidikan sarjana sebanyak 66 orang; pendidikan diploma sebanyak 18 orang; pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 585 orang; pendidikan SLTP/ sederajat sebanyak 607 orang; pendidikan SD/ sederajat sebanyak 676 orang; tidak tamat SD sebanyak 103 orang dan belum sekolah/ belum tamat SD sebanyak 140 orang. Sehingga dari keseluruhan warga mencapai 2.195 orang.

Desa Pasar Baru termasuk dalam wilayah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Letak geografis Desa Pasar Baru sebelah utara berbatasan dengan Desa Manurung dan Desa Mudalang, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pagatan, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pejala dan Desa Juku Eja, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Batuan dan Desa Pagar Ruyung.

Jumlah penduduk pada Desa Pasar Baru untuk data tahun 2014 mencapai 3.361 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.680 jiwa dan perempuan sebanyak 1.681 jiwa yang terbagi dalam 1.008 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut jumlah kepala keluarga yang tergolong sebagai rumah tangga miskin adalah sebanyak 125 kepala keluarga. Tingkat pendidikan penduduk pada Desa Pasar Baru terdiri dari warga yang berpendidikan S2 sebanyak 5 orang; berpendidikan S1 sebanyak 95 orang; berpendidikan D1 sebanyak 15 orang; tamat SMA sebanyak 1.466 orang; tamat SMP sebanyak 356 orang; tamat SD sebanyak 125 orang; tidak tamat SD sebanyak 45 orang dan yang masih buta huruf sebanyak 3 orang.

Mata pencaharian penduduk pada Desa Pasar Baru mayoritas adalah sebagai pedagang yang mencapai 80%, sedangkan 20% nya adalah sebagai PNS, nelayan, Polri, dan petani. Kondisi ini sesuai dengan kondisi wilayah Desa Pasar Baru sebagian besar merupakan pusat perekonomian.

Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru merupakan desa yang ditempati oleh warga masyarakat Bugis Sulawesi. Masyarakat Bugis merupakan masyarakat yang tersohor dengan budaya maritim yang handal, Masyarakat Bugis dan Makassar juga dikenal dengan tradisi rantaunya yang sangat kuat. Mencari ikan di laut termasuk salah satu mata pencarian masyarakat Bugis Makassar.

## **PEMBAHASAN**

Alokasi dana 1 milyar 1 desa diserahkan ke pemerintahan desa secara bertahap dengan system 40% tahap pertama, 40% tahap kedua dan 20% tahap ketiga, setiap tahapan pemerintah desa sebelumnya harus meneyerahkan perencanaan pembangunan desa beserta rencana penggunaan dananya secara

terperinci, kemudian setelah dana tersalurkan pemerintah desa di harus kan menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Adapun pembagian dana 1 milyar yaitu 60% untuk pembangunan infrastruktur dan 40% untuk pemberdayaan desa.

Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru, Kecamatan Kusan Hilir: Produktivitas Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur, di Desa Mattone Kampung Baru pemerintah desa betul-betul melihat dari segi kebutuhan bukan keinginan, penggunaan dan manfaat bagi masyarakat sudah cukup baik. Untuk kegiatan lapangan pemerintah desa menuntut optimalisasi waktu untuk bekerja kepada pekerja proyek agar kegiatan bisa selesai tepat dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja. jika ada kegiatan yang bisa dikerjakan dengan swadaya maka pemerintah desa mengajak masyarakat untuk bekerja sama menyelesaikan pembangunan infrastruktur.

Produktivitas Pemerintah Desa dalam menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur di Desa Pasar Baru yaitu perlu lebih meningkatkan lagi Produktivitas Kinerjanya dalam hal menyelesaikan pembangunan infrastruktur, dalam memulai kegiatan tidak harus tergantung kepada bahan material lengkap baru bisa memulai, dan untuk dukungan dari pemerintah desa sendiri di lapangan agar berjalan dengan baik serta pemanfaatan waktu bekerja dengan maksimal. Untuk itu pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas kinerja Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru dan Pemerintah Desa Pasar Baru sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas, wewenangnya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai bukti

kinerja Pemerintah Desa mengutamakan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada di desa.

Responsivitas Pemerintah Desa dalam menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, dalam menjangkau dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dinilai sudah baik. Cara yang dilakukan Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru dalam menerima dan merealisasikan aspirasi masyarakat, yaitu dengan bekerjasama dengan setiap ketua RT yang ada di Desa Mattone Kampung Baru untuk mengumpulkan warga RT masing-masing guna menggali aspirasi serta keluhan-keluhan dilingkungan RT, untuk kemudian akan ditampung oleh pemerintah Desa Mattone Kampung Baru. Aspirasi akan ditindaklanjuti dalam musrembang desa untuk diusulkan dalam program pembangunan di desa tidak serta merta semua aspirasi bisa masuk kedalam program pembangunan infrastruktur karena aspirasi akan dinilai dari segi kebutuhan masyarakat bukan dari keinginan yang kemudian menjadi prioritas pembangunan di desa.

Sementara itu untuk Desa Pasar Baru sendiri untuk menerima dan merealisasikan aspirasi masyarakat bisa disampaikan langsung kepada Pemerintah Desa Pasar Baru. Pemerintah Desa Pasar Baru berinisiatif untuk mengadakan pertemuan di kantor Desa Pasar Baru, ini cara yang diambil oleh pemerintah desa untuk menggali aspirasi masyarakat. masyarakat diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan aspirasinya pada saat ada pertemuan-pertemuan yang diadakan di desa. Entah itu keluhan-keluhan yang ada dilingkungan RT maupun yang ada dilingkungan Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa sendiri dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang diperoleh dari pertemuan dengan masyarakat adalah dengan cara menyampaikan dan membahas aspirasi bersama-sama pada saat pertemuan di desa bersama-sama dengan masyarakat maupun pada saat musyawarah rencana pembangunan desa (Musrembang Desa) maka dari kegiatan musrembang akan dihasilkan keputusan-keputusan, dari aspirasi masyarakat yang mana saja yang akan masuk kedalam program pembangunan yang tertuang dalam RPJM Des.

Untuk menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat, Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru Dan Pemerintah Desa Pasar Baru tidak semata-mata hanya melihat dari aspirasi langsung bisa dituangkan kedalam program pembangunan yang ada, tetapi dengan cara menentukan prioritas program akan menghasilkan program yang menjadi kebutuhan masyarakat di desa. Dalam menentukan prioritas program ada tahapan untuk pengusulan dan pembahasan RPJM Des di Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru.

Responsibilitas Pemerintah Desa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur di Desa Mattone Kampung Baru, Pemerintah Desa melakukan pembagian pekerjaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing urusan. Pemerintah desa juga menunjuk beberapa perwakilan dari desa untuk turun mengawasi semua kegiatan dalam Pembangunan Infrastruktur secara langsung dilokasi kegiatan dan pengawasan secara tidak langsung dari kelengkapan administrasi kegiatan pembangunan infrastruktur. Responsibilitas di Desa Pasar Baru sendiri Pemerintah Desa dalam pengawasan pembangunan infrastruktur dengan menerjunkan beberapa perwakilan dari desa untuk melakukan pengecekan pekerjaan dilapangan

serta melihat hasil pekerjaan sesuai atau tidak dengan yang diinginkan. Dengan demikian tanggungjawab baik di Desa Mattone Kampung Baru maupun di Desa Pasar Baru sama-sama melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur yang berlangsung di desa masing-masing.

Tujuan dari pada pengawasan ini adalah untuk melihat hasil kerja secara fisik maupun dari kelengkapan administrasi yang ada, apakah hasil yang ada sesuai dengan yang diinginkan atau tidak, jika tidak baik maka langkah yang diambil oleh pemerintah desa adalah menuntut apa yang kurang bisa menjadi baik sesuai dengan yang diharapkan.

Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ) kepada masyarakat di Desa Pasar Baru disampaikan secara tulisan melalui media-media informasi yang ada di Kantor Desa Mattone Kampung Baru kepada masyarakat melalui BPD dan lisan melalui pertemuan di desa, dan selama waktu 5 (lima) tahun ini tidak ada LPJ pemerintah desa yang ditolak oleh masyarakat Desa Mattone Kampung Baru ini menunjukkan akuntabilitas yang baik oleh Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru.

Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPJ) kepada masyarakat di Desa Mattone Kampung Baru dinilai belum optimal karena dalam penyampaian masih secara lisan kepada masyarakat melalui pertemuan di desa, belum ada keseriusan untuk membuat dalam bentuk tulisan dan kemudian menempel dipapan pengumuman belum terlaksana dengan baik di Desa Mattone Kampung Baru.

Akuntabilitas yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru dan Pemerintah Desa Pasar Baru baik secara lisan maupun tulisan adalah bentuk pertanggungjawaban yang wajib disampaikan oleh pemerintah desa sendiri, dari isi laporan pertanggungjawaban tersebut masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah desa selama ini, khususnya dalam hal akuntabilitas dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pemerintah desa baik kepada masyarakat maupun kepada Bupati melalui Camat. Dengan cara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pembangunan infrastruktur kepada masyarakat secara langsung, masyarakat akan merasa dilibatkan karena pembangunan infrastruktur ini berasal dari aspirasi masyarakat dan untuk pertanggungjawabannya juga harus kembali kepada masyarakat.

Selain sisi positifnya, dalam pelaksanaan program 1 milyar 1 desa juga terdapat sisi negatifnya yang merupakan tantangan bagi semua pihak untuk pembenahannya. Adapun beberapa sisi negatif yang dapat diidentifikasi adalah berkembangnya praktek-praktek KKN, masih kesulitannya SDM di pemerintahan desa, aturan penggunaan dana yang berubah-ubah.

Terkait dengan faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan program kegiatan jelas terlihat bahwa faktor kewenangan dan faktor sumber daya manusia faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi pemerintahan.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat dan mendukung kinerja pemerintahan Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru dalam rangka pelaksanaan Program 1 milyar 1 Desa di Kabupaten Tanah Bumbu. Diantaranya

kewenangan dan struktur organisasi kerja. Terkait kewenangan ini Kepala Desa di tempatkan sebagai Pengawas Kegiatan dan bagian dari pemberi pengesahan dalam penggunaan dana untuk di serahkan kepada TPK. Sementara keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Mattone Kampung Baru atau dalam upaya pengelolaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa Hanya bertindak sebagai pengawas kegiatan

Teknis pertanggung jawaban dari pemerintah desa di Desa Mattone Kampung Baru atau dalam pengelolaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa berupa LPJ yaitu Laporan Pertanggung Jawaban dan mengadakan Rapat pertanggung Jawaban.

Sementara itu pada Desa Pasar Baru kewenangan sepenuhnya ada ditangan kepala desa pasar baru, tetapi keputusan yang diambil tidak lepas dari arahan masyarakat karena masyarakat lah yang paling mengetahui atas apa yang mereka inginkan, namun kepala desa yang memilah dan memilih bagian mana yang memang benar benar perlu dan sangat mendesak. Di desa pasar baru BPD tidak ikut serta dalam pengelola dana namun hanya mengawasi konerja dan dana yang dipergunakan oleh desa. Untuk Desa Pasar Baru tidak ada kendala dari struktur organisasi yang dijalankan pada pemerintah desa di Desa Mattone Kampung Baru atau dalam pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa.

Di Desa Mattone Kampung Baru dan perangkat desa terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SD sampai dengan S1. jumlah aparatur desa yang ada di Desa Mattone Kampung Baru dari Kepala Desa sampai dengan Ketua RW dan Ketua RT adalah sebanyak 17 orang.

Kalau dilihat dari tingkat pendidikan masing-masing aparatur desa yang ada di Desa Mattone Kampung Baru tergolong rendah karena kebanyakan tidak sampai lulus SMA. Kondisi tingkat pendidikan yang ada sekarang cukup menghambat pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa di Desa Mattone Kampung Baru, dikarenakan informasi yang di berikan terkadang lambat dalam menjalankannya.

Kegiatan pelatihan bagi aparatur desa di Desa Mattone Kampung Baru atau dalam upaya mendukung pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa. Berupa pelatihan pelaporan bagi sekdes dan bendahara, dan pelatihan penyusunan rab dan penggunaan dana bagi fasilitator desa. kegiatan pelatihan memberikan manfaat bagi kelancaran pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa, namun dirasa masih kurang signifikan.

Sementara untuk Desa Pasar Baru terkait dengan sumber daya manusia ini perangkat desa terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan mulai dari SD sampai dengan S1. Namun demikian kemampuan perangkat desa dalam melaksanakan program 1 Milyar 1 Desa sudah cukup baik. Dari tahapan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggung jawaban sudah terlaksana dengan baik.

Pembiayaan pembangunan desa di Desa Mattone Kampung Baru yang diberikan anggaran oleh pemerintah daerah untuk menjalankan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa. Dan pembiayaan yang diberikan sudah mencukupi untuk pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa, karena sebelum dana diturunkan

pemerintah desa wajib menyerahkan RAB pembangunan secara rinci, jadi dana yang turun pasti mencukupi.

Sementara itu untuk Desa Pasar Baru bahwa alokasi dana desa nya dari retribusi pasar. Desa pasar baru sebenarnya masih kurang karena banyak sekali yang ingin diperbaiki, misalnya meningkatkan UKM agar pendapatan asli desa meningkat bukan hanya dari retribusi pasar. Ini menggambarkan bahwa keinginan dari pemerintah desa untuk memajukan pembagunan desa adalah cukup baik. Karena adanya kemampuan dari perangkat desa untuk senantiasa meningkatkan pembangunan baik secara fisik maupun non fisik pada Desa Pasar Baru. Sehingga dana yang tersedia dirasa selalu masih kurang mencukupi.

Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa perlu adanya penunjang yang ada di tempat bekerja. Terkait dengan peralatan ini di Desa Mattone Kampung Baru atau peralatan yang disediakan lengkap dan memadai, meskipun ada beberapa peralatan seperti computer dalam keadaan rusak dan usang.

Terkait dengan peralatan dalam melaksanakan program 1 Milyar 1 Desa ini pada Desa Pasar Baru lebih lengkap dari pada mattone. Desa Pasar Baru peralatan yang tersedia sudah mendukung terhadap pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa. Peralatan yang tersedia masih dalam kondisi baik.

Paradigma pemberian dana 1 milyar 1 desa diharapkan akan dapat berimplikasi terhadap kebijakan daerah yang memihak kepada kepentingan daerah dan yang memihak kepada kepentingan masyarakat, yaitu dengan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Terkait dengan sumber daya manusia Esman (1986) mengemukakan bahwa sumber daya adalah masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi, dan informasi dari sebuah lembaga. Sumber daya yang paling penting bagi sebuah organisasi adalah pegawai. Karena pegawailah yang menggerakkan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuannya. Pentingnya pegawai bermula dari kenyataan bahwa pegawai merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi. Pegawai yang merancang dan menghasilkan produk-produk barang dan jasa.

Berubahnya struktur organisasi dan mekanisme kerja organisasi menuntut karyawan memiliki wawasan baru, pengetahuan dan keahlian baru. Selain itu, karyawan perlu memiliki sikap mental baru, menggunakan pola pikir baru dan cara kerja baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi serta karyawan juga harus mampu beradaptasi pada situasi baru dengan lebih kreatif, inovatif, proaktif, dan berwawasan *enterpreneurial*. (Ancok, 2001).

## **KESIMPULAN**

- a) Responsivitas atau daya tanggap dari Pemerintah Desa baik Pemerintah Desa Mattone Kampung Baru maupun Desa Pasar Baru dalam menyerap, menampung sampai dengan merealisasikan aspirasi masyarakat, menjangring serta menindaklanjuti kepentingan dan aspirasi masyarakat adalah sudah baik. Aspirasi dan kepentingan yang disampaikan pada kegiatan musrenbang kemudian disalurkan dan ditindaklanjuti untuk diusulkan sebagai program pembangunan desa. Meskipun tidak semua aspirasi dan keinginan masuk dalam program kegiatan pembangunan infrastruktur fisik, karena keinginan

dan aspirasi akan dilihat dan dianalisis dari aspek kebutuhan masyarakat yang bukan hanya sekedar keinginan masyarakat dalam pembangunan desa.

- b) Produktivitas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru, bahwa Produktivitas pelaksanaan pembangunan terutama pembangunan infrastruktur pada Desa Pasar Baru tercapai secara lebih maksimal dan berkualitas baik, sementara untuk Desa Mattone Kampung Baru pencapaian produktivitas pembangunan infrastruktur sudah sesuai dengan standar.
- c) Kualitas layanan berupa pembangunan infrastruktur di Desa Mattone Kampung Baru sudah sesuai standar yang telah ditetapkan. Sedangkan kualitas layanan berupa hasil pembangunan infrastruktur di Desa Pasar Baru lebih baik, karena pada desa ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas.
- d) Responsibilitas Pemerintah Desa terutama dalam kegiatan pengawasan terhadap jalannya pembangunan infrastruktur di Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru, Pemerintah Desa baik di Desa Mattone Kampung Baru maupun Desa Pasar Baru sudah menyelenggarakan pembagian tugas dan pekerjaan sesuai fungsi pada masing-masing urusan program kegiatan. Pemerintah desa menetapkan dan menugaskan petugas dan aparat desa untuk turun mengawasi dan mengontrol kegiatan dalam Pembangunan Infrastruktur secara langsung pada lokasi kegiatan dan pengawasan atau kontrol secara tidak langsung dari berbagai kelengkapan berkas administrasi dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Mattone Kampung Baru dan Desa Pasar Baru.
- e) Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program kegiatan 1 Milyar 1 Desa khususnya kegiatan pembangunan infrastruktur fisik berupa dalam bentuk Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah Desa kepada masyarakat di Desa. Untuk Pemerintah Pasar Baru Laporan Pertanggung jawaban disampaikan oleh Pemerintah Desa secara tulisan melalui berbagai media informasi yang ada di Kantor Desa Pasar Baru kepada masyarakat, serta laporan kepada BPD secara lisan melalui pertemuan di desa, dan selama kurun waktu 5 tahun ini tidak ada laporan pertanggung jawaban dari pemerintah desa

yang ditolak oleh masyarakat Desa. Sehingga ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik oleh Pemerintah Desa Pasar Baru. Sementara pada desa Mattone Kampung Baru hanya dilakukan secara lisan kepada warga masyarakat melalui pertemuan dan rapat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press
- Fandy V. Sagai, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur (Suatu Studi di Desa Pakuure III Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)*.
- Ismanto, Budi. *Profil Kabupaten Tanah Bumbu*. Banjarmasin: Raffa Colecction
- Karen Chapple, Sergio Montero, *From learning to fragile governance: Regional economic development in rural Peru*, Journal of Rural Studies.
- Marek Furmankiewicz, Aine Macken-Walsh, *Government within governance? Polish rural development partnerships through the lens of functional representation*, Journal of Rural Studies.
- Maschab, Mashuri. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta:PolGov.
- Muktadir, Abdul. *Profil Desa Mattone Kampung Baru*. Pagatan: Desa Mattone Kampung Baru
- Nawawi, H. Hadari. (2005). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Sitorus, Risma. (2009). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara*. Tesis Universitas Sumatera Utara,
- Stevan F. Rempowatu, *Evaluasi Kinerja Pemerintah Dalam Pembangunan di Desa Tewasen Kecamatan Amurang Barat*.
- Sufianto, Dr H Dadang.(2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Pustaka setia.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sukanto, Azwardi.(2014). *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*. Jurnal.Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Suksesi. (2007). *Efektifitas program alokasi dana desa (ADD) terhadap perekonomian desa di Kabupaten Pacitan*.